



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDDY ISKANDAR
2. Jabatan : LURAH TERITIP
3. NHK : 478364

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.135.000.000**

1. Tanah Seluas 6037 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 115.500.000
2. Tanah Seluas 439 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 3604 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 2769 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
5. Tanah Seluas 2988 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
6. Tanah Seluas 2226 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
7. Tanah Seluas 1904 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
8. Tanah Seluas 2991 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
9. Tanah Seluas 2972 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
10. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 289.180.000**



1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 21.850.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 262.580.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.825.743
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.433.005.743
III. HUTANG	Rp.	598.371.761
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	834.633.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.